



Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung *Good Governance* Dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Propinsi Di Indonesia Tahun 2010- 2014)

Agus Tri Basuki¹⁾, Nano Prawoto²⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta^{1,2)}
Jl. Lingkar Selatan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Telp: 0274-387665
Email: agustribasuki@yahoo.com^{a)}

Abstract

This study aimed to analyze the quality of local government spending on economic pertumbuhan. Shopping area for education and health are expected to have an influence on economic growth, so that the local government must complete the basic education for the people that free education for nine years, and for the region that has met nine years it needs to be increased to a free education for 12 years and continue the program Indonesia healthy is to protect the health of its citizens through BPJS or other health insurance. Due to the increase in the old school and the health impact on the human resources community and ultimately increase economic growth will increase. Local investment is expected to have an impact on regional economic growth, so the central government through local authorities are required to condition conducive economic climate. Opinion CPC and is expected to LPKD have an impact on regional economic growth, the expected role of the central government through the CPC is critical in controlling the area of financial irregularities, so the impact on the performance of the region and will eventually boost economic growth. Results of the research budget allocation for health, marine and fisheries and General Allocation Fund has an influence in promoting economic growth, while the budget allocations for education, the role of FDI and Opinion CPC against LKPD report has no effect on economic growth.

Keywords: economic growth, good governance, and fiscal policy

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Untuk mencapai sasaran di atas bukanlah pekerjaan ringan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimilikinya.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis

luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan (RPJMN 2014-2019).

Selanjutnya penjabaran TRISAKTI (LIHAT RPJMN Pemerintahan Jokowi) diwujudkan dalam bentuk:

- a. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- b. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
- c. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujudkan (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat local, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju.

Kebijakan 2irri2 adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan perencanaan dan pengawasan pengeluaran negara/daerah maka akan berdampak pada kondisi perekonomian yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi kebocoran APBN atau APBD maka pemerintah perlu melakukan pengawasan dengan bantuan KPK dan BPK. Kebijakan fiskal (APBN/APBD) memiliki fungsi :

- a. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
- b. **Fungsi pengawasan**, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
- c. **Fungsi alokasi**, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- d. **Fungsi distribusi**, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- e. **Fungsi stabilisasi**, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Selain dengan perencanaan dan pengawasan APBN/APBD dalam mempengaruhi kondisi perekonomian, investasi juga dapat diandalkan untuk menciptakan strategi pembangunan *Pro Growth, Prp Poor dan Pro Job*.

Arsyad menjelaskan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai

tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumber daya ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini diukur dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar (*local discretion*) kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (*local needs*)

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan peranan pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, Kelautan dan Perikanan dan, Investasi serta opini BPK terhadap LKPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam pembangunan ekonomi daerah dan terciptanya *good governance*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran Kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Ingin mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Ingin mengetahui pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Ingin mengetahui pengaruh Opini BPK terhadap LKPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Urgensi Penelitian

Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Sebagai gambaran, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seringkali bersifat virtual dalam jangka pendek atau tidak dirasakan masyarakat karena aktivitas ekonomi dalam jangka pendek relatif tidak berpengaruh, dan dalam jangka panjang, dimensi keadilan sosial ekonomi dari buruknya aransemen kebijakan fiskal jelas akan membebani masyarakat dari berbagai sendi kehidupan. Persoalannya adalah bahwa rincian kebijakan yang ada di dalam APBN/APBD sering kali tidak menunjukkan arah kebijakan dan menjadi program *guideliness* yang dapat memberikan peluang-peluang stimulasi bagi aktivitas perekonomian dan sektor swasta. Sebagian besar dari komponen kebijakan yang ada di dalamnya justru didominasi oleh unsur-unsur tidak produktif dan tidak dinamis.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) peranan alokasi, mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; (2) peranan distribusi pendapatan atau kekayaan; dan (3) peranan stabilisasi perekonomian (Mangkoesobroto, 2001)

Peranan stabilisasi perekonomian sangat penting dilakukan karena keadaan perekonomian tidak selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran dan neraca pembayaran luar negeri yang terus menerus defisit merupakan beberapa gejala ekonomi makro yang tidak dikehendaki bangsa manapun di bumi ini. Oleh karena masalah tersebut secara langsung menyangkut variabel-variabel ekonomi agregat dan hanya dapat diatasi dengan mengendalikan jalannya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, maka salah satu kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah ditunjukkan oleh besarnya APBN/APBD yang diperlukan sebagai suatu pedoman sehingga kegiatan pemerintah itu dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat mengadakan pertimbangan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dalam pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, dimana peranan pemerintah daerah dalam perekonomian relatif besar, pengeluaran pemerintah daerah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan,

tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik.

Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Sebagai gambaran, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seringkali bersifat virtual dalam jangka pendek atau tidak dirasakan masyarakat karena aktivitas ekonomi dalam jangka pendek relatif tidak berpengaruh, dan dalam jangka panjang, dimensi keadilan sosial ekonomi dari buruknya aransemen kebijakan fiskal jelas akan membebani masyarakat dari berbagai sendi kehidupan. Persoalannya adalah bahwa rincian kebijakan yang ada di dalam APBN/APBD sering kali tidak menunjukkan arah kebijakan dan menjadi program guidelines yang dapat memberikan peluang-peluang stimulasi bagi aktivitas perekonomian dan sektor swasta.

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam mengkaji efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat menciptakan strategi pembangunan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.

2. TELAAH LITERATUR

Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa investasi merupakan pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, namun digunakan untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa di masa yang akan datang.

Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu 4irri4. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan produk domestik bruto.

Hasil penelitian Robert J. Barro, 1991, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berhubungan dengan saham publik investasi. Kevin Sylwester, 2000, Peningkatan tingkat modal manusia tidak memiliki hubungan positif, dan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan. Rock-Antoine Mehanna, bahwa keterbukaan perdagangan merangsang investasi, yang pada gilirannya memacu pertumbuhan. Sri Nawatmi, 2013, investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah secara praktis akan mempengaruhi aktivitas perekonomian, bukan hanya karena pengeluaran pemerintah dapat menciptakan proses pembangunan, tetapi juga sebagai salah satu komponen agregat demand yang dapat menambah produk.

Hasil penelitian Suleiman A.S. Aruwa, 2012, ada hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, dan pengeluaran dan pendapatan publik untuk kasus Nigeria. Vector Error Correction Model menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB dan pendapatan menyebabkan pertumbuhan pengeluaran publik. Hendarmin, 2013, Pengaruh Belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bertanda positif tapi tidak signifikan, Ndari Sujaningsih, dkk, 2012, terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang.

Perdebatan tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan masih berjalan sampai sekarang. Ekonom, sejarawan dan para ahli politik telah terlibat dalam debat yang panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian.

Hasil penelitian Paolo Mauro, 1995, Korupsi dapat menurunkan investasi, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kwabena Gyimah-Brempong, 2002, korupsi mengurangi tingkat pertumbuhan pendapatan. Peningkatan satu unit indeks korupsi mengurangi tingkat pertumbuhan PDB antara 0,75 dan 0,9 poin persentase, dan pendapatan per kapita antara 0,39 dan 0,41 poin persentase; efek relatif besar mengingat lambatnya pertumbuhan ekonomi di Afrika. Korupsi menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita secara langsung dengan menurunkan produktivitas sumber daya yang ada dan secara tidak langsung melalui pengurangan investasi. Sri Nawatmi, 2013, Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

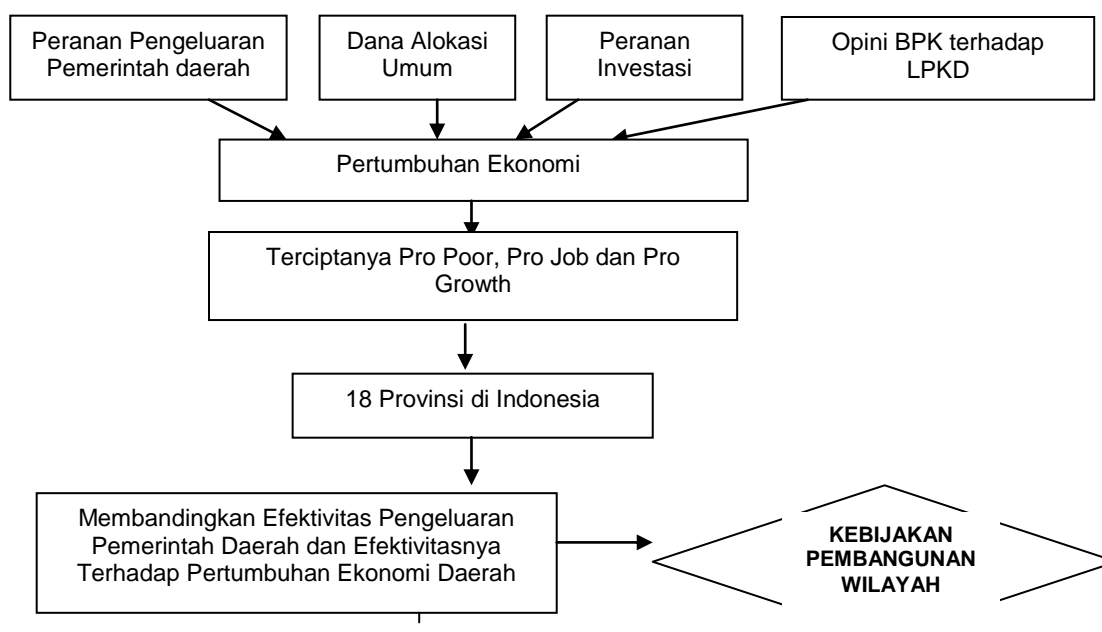
3. METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Kerja

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat menciptakan strategi pembangunan yang pro poor, pro job dan pro growth.

Penelitian ini direncanakan akan dibagi dalam dua tahapan dan setiap tahap diperlukan waktu selama satu tahun. Pada tahap pertama akan dilakukan pengujian peranan pengeluaran pemerintah daerah untuk anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peranan investasi dan opini BPK terhadap LKPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tercapai pro poor, pro job dan pro growth. Sedangkan pada tahap kedua, akan dianalisis ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia bagian barat, Tengah dan timur dengan membandingkan efektifitas kualitas pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

Adapun kerangka kerja dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 1



Gambar 1. Kerangka kerja penelitian

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Terikat	Pertumbuhan Ekonomi
Variabel Bebas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan 2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan 3. Dana Alokasi 4. Investasi Daerah 5. Opini BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Cara pengambilan data adalah dengan cara mengumpulkan data skunder di BPS, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan berbagai terbitan dari tahun 2009 sampai 2013. **Data skunder** adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan data skunder, dengan perincian sebagai berikut:

Variabel Terikat	Pertumbuhan Ekonomi Dicari di Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia dari berbagai terbitan
Variabel Bebas	Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Diperoleh dari BPS dan Departemen Keuangan (berbagai terbitan) Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Diperoleh dari BPS dan Departemen Keuangan (berbagai terbitan)

Dana Alokasi Umum
 Investasi Daerah
 Diperoleh dari BPS dan Departemen Keuangan (berbagai terbitan)
 Opini BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

3.4. Definisi Operasional

	Skala pengukuran variabel menggunakan skala rasio
Variabel Terikat	Pertumbuhan Ekonomi Diperoleh dari $\Delta PDRB = (PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1} \times 100\%$
Variabel Bebas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan diperoleh dari perbandingan Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan dibagi APBD 2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan diperoleh dari perbandingan Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan dibagi APBD 3. Investasi Daerah diperoleh dari perbandingan Investasi daerah dibagi PDRB 4. Opini BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk Dummy

3.5. Alat Analisis

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. **Pertama**, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. **Kedua**, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series*. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja. Dan Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Menurut Wibisono (2005) keunggulan regresi data panel antara lain : **Pertama**. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan *fixed effect* spesifik individu. **Kedua**. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks. **Ketiga**, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. **Keempat**, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (*multikolinearitas*) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. **Kelima**, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan **Keenam**, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

a. Model Regresi Data Panel

Model Regresi Panel dari judul diatas sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (LDR)

α = Konstanta

X1 = Variabel independen 1

X2 = Variabel independen 2

$b_{(1..2)}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = *Error term*

t = Waktu

i = Perusahaan

b. Metode Estimasi Model Regresi Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1) *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2). *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopanya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3). *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS)

c. Pemilihan Model

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

1). Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

2). Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan.

3). Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM).

1). *Common Effects Model*

Model *common effects* merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, mengestimasi menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square*.

Adapun persamaan regresi dalam model *common effects* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

$i = \text{Aceh, Sumut,....., Papua}$

$t = 2009, 2010, 2011, 2012, 2013$

dimana i menunjukkan *cross section* (individu) dan t menunjukkan periode waktunya. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section* dapat dilakukan.

2). *Fixed Effects Model*

Model *Fixed effects* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepanya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects*, setiap merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + i\alpha_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \vdots \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & x_{p1} \\ x_{12} & x_{22} & x_{p2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{1n} & x_{2n} & x_{pn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Teknik seperti diatas dinamakan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model.

3). Random Effects Model

Berbeda dengan *fixed effects model*, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan *random effects model* (REM). Model ini sering disebut juga dengan *error component model* (ECM). Dengan demikian, persamaan model *random effects* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + w_{it}$$

i = Aceh, Sumut,....., Papua
t = 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Dimana :

$$w_{it} = \varepsilon_{it} + u_i ; E(w_{it}) = 0; E(w_{it}^2) = \alpha^2 + \alpha_u^2;$$

$$E(w_{it}, w_{jt-1}) = 0; i \neq j; E(u_i, \varepsilon_{it}) = 0;$$

$$E(\varepsilon_i, \varepsilon_{is}) = E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) = E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{is}) = 0$$

Meskipun komponen error w_t bersifat homoskedastik, nyatanya terdapat korelasi antara w_t dan w_{t-1} (*equicorrelation*), yakni :

$$Corr(w_{it}, w_{i(t-1)}) = \alpha_u^2 / (\alpha^2 + \alpha_u^2)$$

Karena itu, metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effects*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *Generalized Least Squares* (GLS) dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *cross-sectional correlation*.

Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) antara lain :

- 1) Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan β spesifik individu;
- 2) Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
- 3) Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
- 4) Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- 5) Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- 6) Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Secara formal, ada tiga prosedur pengujian yang akan digunakan, yaitu uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara :

- 1) Model common effects atau *fixed effects*;
- 2) Uji *Langrange Multiplier* (LM) yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* atau model *random effects*;
- 3) Uji *Hausman* yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effects* atau model *random effects*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Regresi

Berikut ini adalah hasil regresi panel dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* sebagai berikut :

a. Metode Commont Effect

Tabel 1. Metode Common Effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PEND?)	0.510883	0.142930	3.574354	0.0006
LOG(KESH?)	0.384486	0.178859	2.149657	0.0345
LOG(KEL?)	0.246958	0.131669	1.875603	0.0642
DAU?	-1.72E-07	2.36E-07	-0.728526	0.4683
LOG(INV?)	0.237979	0.046857	5.078832	0.0000
OPINI?	0.147414	0.067737	2.176271	0.0323
R-squared	0.646218	Mean dependent var		17.14372
Adjusted R-squared	0.625160	S.D. dependent var		1.203000
S.E. of regression	0.736527	Akaike info criterion		2.290599
Sum squared resid	45.56765	Schwarz criterion		2.457253
Log likelihood	-97.07694	Hannan-Quinn criter.		2.357803
Durbin-Watson stat	0.311437			

Dan hasil outputnya Dimana ditunjukkan dari nilai *Prob (f-stat)* yang kurang dari 0.05 (kecuali dana alokasi umum tidak signifikan, sedangkan alokasi anggaran Kelautan dan perikanan sig pada 0,1) bahwa dengan tingkat keyakinan 95 persen, seluruh variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Variabel yang signifikan ditandai oleh prob t-statistik (sebagai **partial test**) yang kurang dari 0.05. Sehingga dengan tingkat keyakinan 90 persen variabel yang signifikan mempengaruhi PDRB adalah variabel alokasi anggaran Pendidikan, alokasi anggaran kesehatan, investasi dan opini. Dan model dapat menjelaskan 62,5 persen variasi yang terjadi pada variabel PDRB (*adjusted R-squared*).

b. Model Fixed Effect

Tabel 2. Model Fixed Effect

Dependent Variable: **LOG(PDRB?)**

Method: Pooled Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.10552	0.359329	42.03818	0.0000
LOG(PEND?)	0.014172	0.024743	0.572797	0.5687
LOG(KESH?)	0.062627	0.031318	1.999742	0.0496
LOG(KEL?)	0.095528	0.024119	3.960734	0.0002
DAU?	2.24E-07	5.30E-08	4.227056	0.0001
LOG(INV?)	-0.004435	0.008294	-0.534709	0.5946
OPINI?	-0.009698	0.008351	-1.161297	0.2497

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998584	Mean dependent var	17.14372
Adjusted R-squared	0.998091	S.D. dependent var	1.203000
S.E. of regression	0.052560	Akaike info criterion	-2.830554
Sum squared resid	0.182327	Schwarz criterion	-2.163939
Log likelihood	151.3749	Hannan-Quinn criter.	-2.561736
F-statistic	2024.287	Durbin-Watson stat	1.189103
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dan hasil outputnya, dimana ditunjukkan dari nilai *Prob (f-stat)* yang kurang dari 0.05 (kecuali dana alokasi dana pendidikan, investasi dan Opini tidak signifikan) bahwa dengan tingkat keyakinan 95 persen, sebagian variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas (PDRB) adalah alokasi anggaran untuk kesehatan, alokasi anggaran untuk kelautan dan dana alokasi umum, variabel yang signifikan ditandai oleh prob t-statistik (sebagai **partial test**) yang kurang dari 0.05. Dan model dapat menjelaskan 99,8 persen variasi yang terjadi pada variabel PDRB (*adjusted R-squared*).

c. Model Random Effect

Tabel 3. Random Effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.80023	0.385677	38.37470	0.0000
LOG(PEND?)	0.024572	0.024630	0.997643	0.3214
LOG(KESH?)	0.077464	0.031128	2.488584	0.0148
LOG(KEL?)	0.091871	0.024041	3.821410	0.0003
DAU?	2.02E-07	5.26E-08	3.846162	0.0002
LOG(INV?)	-0.000690	0.008252	-0.083580	0.9336
OPINI?	-0.009450	0.008338	-1.133366	0.2603

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.642004	0.9933
Idiosyncratic random		0.052560	0.0067

Weighted Statistics			
R-squared	0.649527	Mean dependent var	0.627255
Adjusted R-squared	0.624191	S.D. dependent var	0.103499
S.E. of regression	0.063448	Sum squared resid	0.334130
F-statistic	25.63709	Durbin-Watson stat	0.675947
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.133834	Mean dependent var	17.14372
Sum squared resid	111.5636	Durbin-Watson stat	0.002024

Dan hasil outputnya, dimana ditunjukkan dari nilai *Prob (f-stat)* yang kurang dari 0.05 (kecuali dana alokasi dana pendidikan, investasi dan Opini tidak signifikan) bahwa dengan tingkat keyakinan 95 persen, sebagian variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas (PDRB) adalah alokasi anggaran untuk kesehatan, alokasi anggaran untuk kelautan dan dana alokasi umum, variabel yang signifikan ditandai oleh prob t-statistik (sebagai **partial test**) yang kurang dari 0.05. Dan model dapat menjelaskan 62,4 persen variasi yang terjadi pada variabel PDRB (*adjusted R-squared*).

d. Uji Hausmann Test

Tahapan *Hausmann test* dengan menggunakan :

1. Diasumsikan telah dilakukan pengujian signifikansi *fixed effect*
2. Untuk pengujian hausmann, yang harus pastikan adalah sedang dalam kondisi model random effects

Tabel 4. Uji Hausmann Test

Correlated Random Effects – Hausman Test
Pool: PANELDATA
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f.	Prob.

Cross-section random	52.421874	6	0.0000
----------------------	-----------	---	--------

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PEND?)	0.013916	0.026166	0.000007	0.0000
LOG(KESH?)	0.062095	0.079634	0.000014	0.0000
LOG(KEL?)	0.095288	0.091281	0.000004	0.0532
DAU?	0.000000	0.000000	0.000000	0.0004
LOG(INV?)	-0.004851	-0.000077	0.000001	0.0000
OPINI?	-0.009741	-0.009411	0.000000	0.5228

Nilai Prob yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan kondisi ditolaknya Ho. Dalam hal ini Ho nya adalah Model random lebih baik dibandingkan model Fixed Effect. Sehingga karena nilai prob nya = 0.00000, maka dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa untuk data yang memiliki model **fixed effect lebih sesuai** digunakan.

e. Uji Chow Test

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

- H0 : Common Effect Model atau pooled OLS
- H1 : Fixed Effect Model

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009). Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n - 1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Dimana:

- SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect
- SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect
- n : Jumlah perusahaan (cross section)
- nt : Jumlah cross section x jumlah time series
- k : Jumlah variabel independen

Sedangkan F tabel didapat dari:

$$F\text{-tabel} = \{ \alpha : df(n - 1, nt - n - k) \}$$

Dimana:

- α : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa)
- n : Jumlah perusahaan (cross section)
- nt : Jumlah cross section x jumlah time series
- k : Jumlah variabel independen

Untuk menghitung kita lihat hasil Common Effect dan Random Effect dibawah ini:

$$\begin{aligned}
 F_{n-1, nt, n-k}(\text{ROE}) &= \frac{(45,56765 - 0,182325)/(18-1)}{0,182325/(90-18-5)} \\
 &= 2,669725/0,002721 \\
 &= 981,059 \\
 \text{F-tabel} &= \alpha ; \text{df } (n-1, nT-n-k) \\
 &= 5\% ; (18-1; 18.5-18-5) \\
 &= 5\% ; (17; 67) \\
 &= 1,836
 \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan F-hitung didapat sebesar 981,059 sedangkan F-tabel dari numerator 17 dan denumenator 67 pada α : 5% adalah 1,836. Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F-hitung lebih besar dari F-tabel ($55,99 > 2,04$), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah **Fixed Effect Model**.

4.2. Uji Asumsi Klasik Untuk Data Panel

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS.

1. Uji linieritas 12irri12 tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
2. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.
3. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
4. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu 12irri12le bebas. Jika 12irri12le bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas.
5. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke 12irri data *cross section* dibandingkan *time series*.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

Dependent Variable: **LOG(PDRB?)**

Method: Pooled Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.10552	0.359329	42.03818	0.0000
LOG(PEND?)	0.014172	0.024743	0.572797	0.5687
LOG(KESH?)	0.062627	0.031318	1.999742	0.0496
LOG(KEL?)	0.095528	0.024119	3.960734	0.0002
DAU?	2.24E-07	5.30E-08	4.227056	0.0001
LOG(INV?)	-0.004435	0.008294	-0.534709	0.5946
OPINI?	-0.009698	0.008351	-1.161297	0.2497

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998584	Mean dependent var	17.14372
Adjusted R-squared	0.998091	S.D. dependent var	1.203000
S.E. of regression	0.052560	Akaike info criterion	-2.830554
Sum squared resid	0.182327	Schwarz criterion	-2.163939
Log likelihood	151.3749	Hannan-Quinn criter.	-2.561736
F-statistic	2024.287	Durbin-Watson stat	1.189103
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.3. Hasil Penelitian

Dari uraian data di atas terlihat kalau uengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan probabilitasnya ebih besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa alokasi pendidikan tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan tetapi hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Artinya selama ini peningkatan alokasi dana pendidikan sebagian besar digunakan untuk sertifikasi dan operasional sekolah.

Data di atas juga memperlihatkan kalau pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih kecil dari 0,05. Dan ini membuktikan bahwa pengurangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu dengan adanya indonesia sehat dapat mendorong produktivitas, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, juga terlihat pengeluaran Pemerintah Untuk alokasi Kelautan dan Perikanan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih kecil dari 0,05. Karena 2/3 bagian negara kita berwujud lautan maka alokasi pengeluaran pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya dibidang kelautan dan perikanan, sehingga sektor kemaritiman akan meningkat.

Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih kecil dari 0,05. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di [Indonesia](#) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada [APBN](#), dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada [APBD](#). Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sebagai pelengkap dana dalam pembangunan daerah.

Investasi Asing (PMA) tidak memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih besar dari 0,05. Dalam teori pembangunan ekonomi, Investasi adalah suatu komponen dari [PDB](#) dengan rumus $PDB = C + I + G + (X-M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I = (Y, i)$. Hal ini dapat kita lihat bahwa selama ini penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak mengeksplorasi sumber daya alam, dan daerah yang hanya mengandalkan sumber daya alam pertumbuhan ekonominya rata-rata rendah, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan menaikkan nilai tambah dari produk hasil alam, sehingga peranan investasi dapat betul-betul dioptimalkan.

Terakhir, terlihat jika opini BPK terhadap LPKD tidak memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih besar dari 0,05. Selama ini pemerintah daerah belum mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja, yang dilaksanakan hanya sebatas penyerapan anggaran, dan ini belum berdampak pada outcome dari masing-masing program yang dilaksanakan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat kita simpulkan :

- a. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Pengeluaran Pemerintah Untuk Alokasi Kelautan dan Perikanan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Investasi Asing (PMA) tidak memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Opini BPK terhadap LPKD tidak memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

5.2 Rekomendasi

- a. Dalam penelitian ini alokasi anggaran untuk pendidikan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, berarti bahwa alokasi pendidikan tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan tetapi hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Artinya selama ini peningkatan alokasi dana pendidikan sebagian besar digunakan untuk sertifikasi dan operasional sekolah. Pemerintah harus membuat kinerja yang terukur di bidang pendidikan terutama dalam menentukan perbandingan SMA dan SMK, diusahakan jumlah

- SMK lebih banyak dibandingkan dengan SMA, sehingga 60 persen angkatan tenaga kerja adalah tenaga kerja terdidik.
- b. PMA belum memberikan peran besar dalam pembangunan ekonomi, hal ini dapat kita lihat bahwa selama ini penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak mengeksplorasi sumber daya alam, dan daerah yang hanya mengandalkan sumber daya alam pertumbuhan ekonominya rata-rata rendah, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan menaikkan nilai tambah dari produk hasil alam, sehingga peranan investasi dapat betul-betul dioptimalkan.
 - c. Peran pemerintah harus dioptimalkan melalui monitoring anggaran belanja, yaitu bahwa uang yang berasal dari APBD adalah uang rakyat, sehingga harus digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Selama ini pemerintah daerah belum mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja, yang dilaksanakan hanya sebatas penyerapan anggaran, dan ini belum berdampak pada outcome dari masing-masing program yang dilaksanakan.

REFERENSI

- Barro, Robert J., "A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government," National Bureau of Economic Research, working paper No. 2855, February 1989.
- , "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth," *Journal of Political Economy*, XCVIII (1990), S103-25.
- , and Gary S. Becker, "Fertility Choice in a Model of Economic Growth," *Econometrica*, LVII (1989), 481-501.
- , and Xavier Sala i Martin, "Economic Growth and Convergence across the United States," National Bureau of Economic Research, working paper, July 1990.
- , and , "The Neoclassical Growth Model," Chapter 1 of unpublished manuscript, 1991.
- , and Holger C. Wolf, "Data Appendix for Economic Growth in a Cross Section of Countries," unpublished, National Bureau of Economic Research, November 1989.
- David E. Bloom, David Canning, Linlin Hub, Yuanli Liu, Ajay Mahal, Winnie Yip, 2010, The contribution of population health and demographic change to economic growth in China and India, *Journal of Comparative Economics* 38 (2010) 17–33
- Kwabena Gyimah-Brempong, 2002, Corruption, economic growth, and income inequality in Africa, *Econ. Gov.* (2002) 3: 183–209
- Kevin Sylwester, 2000, Income inequality, education expenditures, and growth, *Journal of Development Economics* Vol. 63 _2000. 379–398
- N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil, 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, No. 2 (May, 1992), pp. 407-437
- Paolo Mauro, 1995, Corruption and Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3 (Aug., 1995), pp. 681-712.
- Suleiman A.S. Aruwa, 2012, Public finances and economic growth in Nigeria, *Public and Municipal Finance*, Volume 1, Issue 2, 2012, pp. 29-36
- Rock-Antoine Mehanna, The Temporal Causality Between Investment And Growth In Developing Economies, *Journal Of Business And Economics Research* Volume 1, Number 3, p. 85-91.

LAMPIRAN

No	Nama Daerah	Tahun	PDRB	Pendidikan	Kesehatan	Kelautan dan Perikanan	DAU	PMA	Opini
1	N Aceh D	2010	33.103.000	934.427	710.433	128.029	621.432	41.050	3
		2011	34.705.000	898.432	798.871	126.341	716.646	203.626	3
		2012	36.488.000	906.936	895.106	164.610	911.080	1.665.878	3
		2013	38.013.000	638.365	886.579	299.537	1.292.445	1.147.788	3
		2014	39.705.500	1.272.862	1.090.270	257.550	1.201.612	387.288	3
2	Sumatera Utara	2010	118.719.000	238.109	205.169	32.199	792.119	1.628.419	3
		2011	126.568.000	100.426	229.811	28.429	948.867	6.834.565	3
		2012	134.462.000	362.873	263.492	72.413	1.103.389	6.240.262	3
		2013	142.537.000	239.707	297.944	89.082	1.223.445	10.817.133	3
		2014	150.408.500	206.114	401.700	80.821	1.349.132	6.852.389	3
3	Riau	2010	97.736.000	483.606	271.676	40.085	58.869	778.919	5
		2011	102.666.000	346.600	295.892	40.054	380.051	1.925.486	3
		2012	106.299.000	461.690	417.426	38.024	489.179	11.148.107	3
		2013	109.073.000	466.407	538.821	61.098	726.630	15.905.960	4
		2014	113.354.500	531.060	558.365	98.010	820.984	17.037.387	4
4	Sumatera Selatan	2010	63.859.000	562.557	420.049	14.289	507.356	1.674.885	3
		2011	68.008.000	210.865	296.520	21.100	646.813	5.053.809	3
		2012	72.096.000	244.650	266.016	26.069	716.153	7.604.957	3
		2013	76.410.000	273.713	176.775	41.752	870.516	5.922.909	3
		2014	80.528.500	261.199	269.582	41.421	985.542	13.143.052	3
5	Bengkulu	2010	8.340.000	66.956	144.555	13.315	523.041	225.475	3
		2011	8.879.000	61.106	162.300	11.686	607.388	390.428	3
		2012	9.465.000	116.211	194.108	12.694	775.311	294.268	5
		2013	10.052.000	130.423	219.206	18.621	854.647	272.054	5
		2014	10.614.500	138.889	226.135	22.587	955.095	240.307	5
6	Jawa Tengah	2010	186.993.000	283.958	740.701	44.833	1.168.788	531.640	3
		2011	198.270.000	264.582	922.091	64.806	1.276.180	1.586.582	4
		2012	210.848.000	257.218	973.038	72.731	1.516.892	2.335.427	5
		2013	223.100.000	271.397	1.248.836	85.337	1.670.859	5.659.317	4
		2014	235.027.500	271.213	1.625.098	82.121	1.803.931	5.764.206	5
7	Kalimantan Selatan	2010	30.675.000	302.257	241.106	28.736	483.365	1.817.710	3
		2011	32.553.000	353.395	361.747	33.302	504.876	2.466.973	3
		2012	34.413.000	171.115	485.830	27.081	652.535	2.633.057	3
		2013	36.196.000	361.429	689.024	49.650	683.511	3.176.688	3
		2014	38.065.000	422.201	1.021.096	49.140	701.725	6.250.996	5
8	Kalimantan Timur	2010	110.953.000	325.103	655.609	43.619	0	9.820.211	3
		2011	115.490.000	272.555	636.232	44.472	51.446	5.462.904	3
		2012	120.086.000	308.031	807.169	58.012	52.637	19.476.202	5
		2013	121.990.000	588.007	1.154.193	82.423	55.539	16.277.052	5
		2014	126.556.500	663.840	964.480	100.768	57.312	26.692.074	5

No	Nama Daerah	Tahun	PDRB	Pendidikan	Kesehatan	Kelautan dan Perikanan	DAU	PMA	Opini
9	Sulawesi Utara	2010	18.377.000	63.983	61.959	14.289	558.635	2.039.061	5
		2011	19.735.000	85.940	90.580	21.620	619.711	1.996.575	3
		2012	21.287.000	88.551	96.126	30.109	790.534	451.124	4
		2013	22.872.000	85.124	122.589	31.442	885.684	800.897	4
		2014	24.327.000	78.026	176.891	47.147	949.852	1.224.729	5
10	Sulawesi Tengah	2010	17.624.000	65.149	110.723	15.507	659.331	1.244.811	3
		2011	19.231.000	70.244	176.835	29.204	743.161	3.358.403	3
		2012	21.008.000	79.083	166.022	51.915	902.087	7.799.155	4
		2013	22.979.000	103.487	179.235	60.915	981.035	10.421.990	3
		2014	24.671.000	110.089	199.810	71.457	1.053.636	18.587.384	4
11	Nusa Tenggara Barat	2010	20.073.000	22.610	149.740	18.726	602.389	1.982.818	1
		2011	19.533.000	16.679	199.858	21.766	646.671	4.217.308	5
		2012	19.319.000	30.065	196.141	33.708	809.617	6.148.089	5
		2013	20.417.000	30.153	226.980	31.178	859.353	5.950.269	5
		2014	21.515.000	38.994	392.967	31.961	980.300	6.856.072	5
12	Nusa Tenggara Timur	2010	12.547.000	74.659	132.010	14.806	674.636	34.450	3
		2011	13.252.000	74.474	142.069	19.716	940.646	49.798	3
		2012	13.970.000	81.341	165.695	31.477	940.646	84.358	3
		2013	14.746.000	72.066	177.060	38.053	1.003.991	120.062	3
		2014	15.457.500	49.539	198.570	52.837	1.131.687	187.564	3
13	Maluku	2010	4.251.000	132.458	87.061	21.994	607.572	25.974	1
		2011	4.509.000	130.959	113.786	40.623	703.993	106.056	1
		2012	4.861.000	85.146	117.855	50.187	829.491	82.370	1
		2013	5.111.000	83.478	159.181	48.913	897.657	643.157	3
		2014	5.416.000	117.348	200.618	74.392	1.019.704	163.009	3
14	Papua	2010	22.400.000	239.265	443.938	31.337	1.058.228	2.963.515	1
		2011	21.208.000	249.232	475.364	42.133	1.276.285	11.897.666	1
		2012	21.436.000	189.072	575.941	46.031	1.569.782	11.627.523	1
		2013	24.617.000	181.773	672.966	52.772	1.889.267	28.766.078	3
		2014	24.135.000	88.724	649.772	45.796	1.991.202	15.681.908	3
15	Maluku Utara	2010	3.036.000	34.374	57.959	20.000	479.727	2.211.824	1
		2011	3.230.000	14.567	65.664	12.730	540.389	1.177.424	1
		2012	3.446.000	24.357	67.476	20.608	703.159	872.753	1
		2013	3.656.000	32.850	90.429	23.184	772.591	3.272.344	1
		2014	3.861.000	39.994	113.277	26.763	906.623	1.227.971	1
16	Banten	2010	88.552.000	165.482	203.800	14.710	381.979	13.883.799	3
		2011	94.198.000	190.857	270.394	26.961	460.333	19.692.903	3
		2012	99.992.000	222.814	228.645	24.849	530.833	26.266.270	3
		2013	105.856.000	278.448	382.492	14.090	671.081	45.345.901	1
		2014	111.576.000	308.400	395.091	17.184	728.490	25.310.761	3
17	Papua Barat	2010	9.361.000	81.358	91.773	28.781	605.900	154.253	1
		2011	11.890.000	77.108	71.846	35.136	700.444	300.033	1

No	Nama Daerah	Tahun	PDRB	Pendidikan	Kesehatan	Kelautan dan Perikanan	DAU	PMA	Opini
		2012	13.780.000	82.056	87.962	41.471	901.398	309.779	1
		2013	15.062.000	81.657	82.906	44.438	1.064.872	660.097	1
		2014	17.271.500	126.711	172.643	99.037	1.122.264	1.907.648	1
18	Sulawesi Barat	2010	4.744.000	29.627	38.323	10.159	405.750	335.801	3
		2011	5.233.000	27.431	27.500	17.611	441.578	50.931	3
		2012	5.704.000	42.505	39.141	20.528	590.680	2.210	3
		2013	6.113.000	35.300	50.404	33.160	685.497	30.691	3
		2014	6.593.000	45.402	77.636	53.708	776.214	201.929	3

Sumber : BPS, Bank Indonesia dan LKPD (Berbagai Terbitan)

Common Effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/01/15 Time: 06:21

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PEND?)	0.510883	0.142930	3.574354	0.0006
LOG(KESH?)	0.384486	0.178859	2.149657	0.0345
LOG(KEL?)	0.246958	0.131669	1.875603	0.0642
DAU?	-1.72E-07	2.36E-07	-0.728526	0.4683
LOG(INV?)	0.237979	0.046857	5.078832	0.0000
OPINI?	0.147414	0.067737	2.176271	0.0323
R-squared	0.646218	Mean dependent var		17.14372
Adjusted R-squared	0.625160	S.D. dependent var		1.203000
S.E. of regression	0.736527	Akaike info criterion		2.290599
Sum squared resid	45.56765	Schwarz criterion		2.457253
Log likelihood	-97.07694	Hannan-Quinn criter.		2.357803
Durbin-Watson stat	0.311437			

Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/01/15 Time: 06:23

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.10552	0.359329	42.03818	0.0000
LOG(PEND?)	0.014172	0.024743	0.572797	0.5687
LOG(KESH?)	0.062627	0.031318	1.999742	0.0496
LOG(KEL?)	0.095528	0.024119	3.960734	0.0002
DAU?	2.24E-07	5.30E-08	4.227056	0.0001
LOG(INV?)	-0.004435	0.008294	-0.534709	0.5946

OPINI?	-0.009698	0.008351	-1.161297	0.2497
Fixed Effects (Cross)				
_NAD-C	-0.032260			
_SUMUT-C	1.464572			
_RIAU-C	1.336399			
_SUMSEL-C	0.980461			
_BENGKULU-C	-0.958659			
_JATENG-C	1.721028			
_KALSE-C	0.204768			
_KALTIM-C	1.501681			
_SULUT-C	-0.160130			
_SULTENG-C	-0.264800			
_NTB-C	-0.241065			
_NTT-C	-0.673525			
_MALUKU-C	-1.754291			
_PAPUAN-C	-0.444996			
_MALUT-C	-1.931527			
_BANTEN-C	1.386612			
_PAPUABARAT-C	-0.743646			
_SULBAR-C	-1.390622			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998584	Mean dependent var	17.14372
Adjusted R-squared	0.998091	S.D. dependent var	1.203000
S.E. of regression	0.052560	Akaike info criterion	-2.830554
Sum squared resid	0.182327	Schwarz criterion	-2.163939
Log likelihood	151.3749	Hannan-Quinn criter.	-2.561736
F-statistic	2024.287	Durbin-Watson stat	1.189103
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/01/15 Time: 06:24
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 18
 Total pool (balanced) observations: 90
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.80023	0.385677	38.37470	0.0000
LOG(PEND?)	0.024572	0.024630	0.997643	0.3214
LOG(KESH?)	0.077464	0.031128	2.488584	0.0148
LOG(KEL?)	0.091871	0.024041	3.821410	0.0003
DAU?	2.02E-07	5.26E-08	3.846162	0.0002
LOG(INV?)	-0.000690	0.008252	-0.083580	0.9336
OPINI?	-0.009450	0.008338	-1.133366	0.2603
Random Effects (Cross)				
_NAD-C	-0.056219			
_SUMUT-C	1.459199			
_RIAU-C	1.304584			
_SUMSEL-C	0.962378			
_BENGKULU-C	-0.948231			
_JATENG-C	1.705202			
_KALSE-C	0.178681			

_KALTIM-C	1.447505
_SULUT-C	-0.142742
_SULTENG-C	-0.256710
_NTB-C	-0.228306
_NTT-C	-0.646380
_MALUKU-C	-1.729410
_PAPUAN-C	-0.449607
_MALUT-C	-1.899537
_BANTEN-C	1.359148
_PAPUABARAT-C	-0.716804
_SULBAR-C	-1.342752

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.642004	0.9933
Idiosyncratic random	0.052560	0.0067

Weighted Statistics			
R-squared	0.649527	Mean dependent var	0.627255
Adjusted R-squared	0.624191	S.D. dependent var	0.103499
S.E. of regression	0.063448	Sum squared resid	0.334130
F-statistic	25.63709	Durbin-Watson stat	0.675947
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.133834	Mean dependent var	17.14372
Sum squared resid	111.5636	Durbin-Watson stat	0.002024
